

CTPAT dan *Global Supply Chain Security*

Nur Adian Haristanto¹, Ika Riswanti Putranti²

Departemen Hubungan Internasional Fakultas ISIP Universitas Diponegoro¹

Departemen Hubungan Internasional Fakultas ISIP Universitas Diponegoro²

ABSTRACT

Supply chain security is one of the most integral aspect in global trade. The flow of goods or logistic through land, sea, and air transportation should be granted for its security. But with many Terrorism issue and accident pose a threat to supply chain because terrorism can destroy the flow chain of goods. United States then come as a pioneer in enforcing supply chain security through a program called CTPAT which focused on controlling and exmanining incoming cargo to US by US Custom and Border Protection (incoming import products). But what makes it interesting is, this program can enforce and strengthen global supply chain security. This research was meaning to explain how far is actor's role in enhancing global supply chain security through CTPAT using complex interdependence where CTPAT is a public private partnership which makes private sector is considered into having role in enhancing global supply chain security. This research argue that actors role in enhancing global supply chains security is determined by benefits that actor's gain in CTPAT Partnership and also because the emerging of terrorist threat to supply chain security which also included in CTPAT.

Keywords: *Supply chain security, partnership, private sector, United States, CTPAT.*

A. Pendahuluan

Supply chain (rantai pasok) merupakan bagian dari aktivitas perdagangan yang berfokuskan pada suplai logistik barang baik itu melalui jalur darat, laut (biasanya menggunakan container), maupun udara (pesawat cargo). Oleh karena itu diperlukan adanya *supply chain management* (manajemen rantai pasok). *Supply chain management* melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pendistribusian barang dilakukan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat waktu (Dr. Zaroni, 2016). *Supply chain management* meliputi berbagai usaha koordinasi antar pihak yang terlibat untuk kemudian dapat menciptakan integrasi di bidang suplai logistik barang.

Dalam *supply chain management*, para pihak selain berbagi keuntungan juga berbagi risiko. Risiko ini muncul dikarenakan adanya ancaman bagi keamanan logistik yang kemudian akan mengganggu keberlangsungan *supply chain*. Bentuk-bentuk ancaman keamanan *supply chain* contohnya seperti bencana alam, pencurian, pembajakan, penyelundupan, dan satu hal yang menjadi ancaman terbesar yaitu terorisme. Meskipun pada umumnya beberapa ancaman tersebut tidak selalu terjadi secara langsung di dalam fasilitas dan aktivitas *supply chain*, seperti terorisme contohnya, namun bagaimana cara pihak otoritas

(pemerintah) bersikap dengan menutup pelabuhan, akses darat, laut, dan udara dengan alasan keamanan akan berdampak buruk bagi keberlangsungan *supply chain* yang kemudian akan terhambat arus logistiknya atau bahkan terhenti sehingga dapat berakibat fatal pada perdagangan. Maka diperlukan *risk management* dan tindakan pencegahan yang tepat sasaran agar dapat meminimalkan kerugian (Dr. Zaroni, 2016). Atas dasar *risk management* beberapa institusi internasional merespon dengan mengeluarkan berbagai prosedur upaya pengamanan arus logistik atau kemudian disebut *supply chain security*, pada Juni 2005 WCO (*World Custom Organization*) kemudian menerbitkan SAFE framework of standard to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework) yang berfungsi untuk meminimalisasi ancaman terorisme internasional, mengamankan pendapatan, serta meningkatkan fasilitasi perdagangan (WCO, 2012). Pada Tahun 2007, ISO (*International Standard Organization*) mengeluarkan ISO 28000 sebagai standardisasi manajemen resiko keamanan dengan delapan poin *security management system* (Dr. Zaroni, 2016).

Sebelum adanya respon dari Institusi semacam WCO dan ISO, Amerika Serikat sudah lebih dulu memberikan perhatian khusus terhadap *supply chain security*. Hal ini dilatarbelakangi oleh insiden

serangan terorisme pada 11 September 2001 yang tidak hanya menimbulkan dampak di tempat kejadian saja namun juga berdampak bagi arus perdagangan Amerika Serikat karena adanya penutupan berbagai akses jalur darat, laut dan udara oleh pemerintah sebagai respon atas serangan tersebut sehingga pengiriman logistik menjadi terhambat dan menimbulkan kerugian (Sheffi, 2001). Pada November 2001, Amerika Serikat melalui badan kepabeannya, US Custom and Border Protection (CBP) mengeluarkan program CTPAT (Custom Trade Partnership Against Terrorism). CTPAT memiliki fokus utama pada pengaturan oleh Badan Pabean Amerika Serikat, US Custom and Border Protection terhadap barang-barang yang masuk ke dalam Amerika Serikat (barang impor). Sehingga Entitas baik publik (negara) maupun privat (swasta) yang ingin melakukan kegiatan ekspor impor ataupun pengiriman barang ke Amerika Serikat harus dapat memenuhi persyaratan keamanan yang terdapat dalam CTPAT yang sifatnya *voluntary* atau tanpa paksaan (CBP, 2018). Dengan kata lain, CTPAT berusaha mengatur arus barang dari dan ke Amerika Serikat menggunakan standarisasi yang sudah tercantum didalamnya. Program ini mengedepankan kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Entitas atau perusahaan, kerjasama ini disebut sebagai *public private*

partnership. Namun menariknya, program ini justru dianggap dapat meningkatkan dan memperkuat *global supply chain security*.

Dalam penelitian ini akan digunakan teori interdependensi yang merupakan turunan dari paradigma neo liberalis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye (1977) (seperti dikutip Rana,2015: 291), ketergantungan (dependence) adalah ketika negara sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh kekuatan (faktor) eksternal, sehingga secara ringkas interdependensi sama dengan saling ketergantungan. Sedangkan interdependensi dalam politik internasional adalah kondisi dimana segala kegiatan negara atau aktor hubungan internasional memiliki efek timbal balik. Teori interdependensi yang akan digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye mengenai *complex interdependence* atau interdependensi kompleks. Menurut Keohane dan Nye (seperti dikutip Hadiwinata,2017: 91-92), masuknya aktor non negara ke dalam konstelasi politik internasional menyebabkan terciptanya dimensi baru dalam hubungan internasional sehingga muncul hubungan saling ketergantungan kompleks yang mengandung tiga karakteristik yaitu *multiple channels, multiple issues*, dan minimalisasi peran kekuatan militer.

Dari ketiga karakteristik kunci *complex interdependence*, penulis hanya akan menggunakan dua karakteristik saja, yaitu *multiple channels* dan *multiple issues*. Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye di dalam bukunya "Power and Interdependence: World Politics Among Transition" (Keohane & Nye, 1977: 26) menjabarkan *multiple channels* (jalur majemuk) sebagai suatu kondisi dimana karakteristik politik internasional diwarnai dengan hubungan aktor-aktor antar negara, antar pemerintahan, maupun transaksi internasional sehingga negara bukan merupakan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Hubungan yang ada merupakan hubungan formal antar kepala negara, hubungan formal antar perusahaan transnasional (MNCs), hubungan formal antar organisasi-non pemerintah (NGOs), hubungan informal antar organisasi masyarakat sipil (CSOs), serta hubungan informal antar kaum profesional, dan hubungan informal antar individu (seperti dikutip Hadiwinata, 2017:92). Dalam dunia yang kompleks ini, hubungan formal informal antar pemerintah bukanlah lagi sumber penghubung komunitas, namun justru hubungan informal antara NGO dengan IO lah saat ini yang menjadi semakin vital. Perusahaan Multinasional dan Bank memberikan dampak yang baik bagi domestik maupun di antar negara. Aktor-aktor ini selain berusaha memenuhi

kepentingannya masing masing, juga berfungsi sebagai *transmission belt* (penghubung) menyebabkan kebijakan pemerintah antar negara menjadi lebih sensitif satu sama lain (seperti dikutip Rana, 2015: 292). Aktor-aktor yang ada dalam hubungan internasional kemudian akan berinteraksi melalui saluran-saluran (*channel*) tersebut dan saling bergantung satu sama lain sehingga nantinya akan membentuk struktur dalam tatanan atau sistem internasional mengenai berbagai isu yang sifatnya majemuk (Nuraeni Suparman, 2010)

Kemudian karakteristik kedua yaitu *multiple issues* (isu majemuk), Keohane dan Nye (seperti dikutip Hadiwinata, 2017: 92), mengatakan bahwa adanya pencampuradukkan atau saling tumpang tindihnya berbagai isu (*overlapping*) antara *high politics* yang menyangkut isu-isu politik, strategis, maupun keamanan dengan isu *low politics* yang meliputi berbagai isu ekonomi (perdagangan, investasi, bantuan, dsb), sosial, budaya, pendidikan, teknologi, dsb. Dapat dilihat bahwa situasi saat ini isu dalam hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh *high politics* saja, sehingga dibutuhkan adanya pengaturan dan koordinasi yang baik untuk memperlancar arus hubungan lintas batas negara. Menurut Keohane dan Nye (1977) (seperti dikutip Rana, 2015: 292), dalam dunia yang interdependen kompleks, tidak terdapatnya hierarki dari isu-isu yang

ada menyebabkan perbedaan antara kebijakan domestik dan kebijakan internasional menjadi tidak jelas, sehingga menyebabkan ketidakjelasan agenda dalam hubungan *interstate* atau antar negara. Dalam interdependensi kompleks, tidak ada isu yang menjadi isu utama dalam agenda internasional, segala isu dari berbagai area dapat menjadi isu utama di waktu tertentu. Ketiadaan hierarki dari isu-isu yang menjadi fokus aktor-aktor internasional mengindikasikan bahwa keamanan bukan satu-satunya isu yang mendominasi, semua isu dipandang penting dan dipertimbangkan matang dalam kebijakan negara baik domestik maupun luar negeri (Nuraeni Suparman, 2010).

Sebagai tambahan, interdependensi kompleks menyediakan suatu konsep, *sensitivity*, merupakan sebuah derajat responsivitas atas sebuah kerangka aturan atau bagaimana suatu perubahan di suatu negara berdampak pada perubahan yang mahal bagi pihak lain. Terdapat juga *vulnerability* yang berhubungan dengan ketersediaan relatif dan mahalnya biaya alternatif yang dihadapi oleh aktor (Keohane & Nye (1989), seperti dikutip Rogerson, 2000:421-422). Jika sebuah entitas kurang sensitif terhadap perubahan, entitas tersebut akan dapat mempertahankan status dominan dengan cara menjaga atau

mempertahankan status quo. Dan jika sebuah entitas lebih sensitif, maka entitas tersebut akan merasa terpaksa untuk lebih sering dan lebih cepat menyesuaikan dan mengadaptasikannya pada proses pengambilan keputusan (Rogerson, 2000).

Jika sebuah entitas dianggap *less vulnerable*, entitas tersebut akan memiliki kemampuan untuk tetap mengendalikan atau menjaga kontrol melalui perubahan-perubahan yang dibuat oleh entitas tersebut untuk mengatasi sebuah isu. Tetapi jika entitas dianggap sebagai *more vulnerable*, entitas tersebut akan semakin menjadi tidak mampu untuk mencari solusi atas masalah atau isu yang dihadapi dalam waktu dan sikap yang efisien. Aktor yang *less sensitive* dan *less vulnerable* akan lebih banyak memiliki pengaruh dan kontrol dalam sebuah area permasalahan atau isu. Berikut ini adalah table *supply chain management*, yaitu:

Tabel 1.1 Indikator *relative sensitivity & vulnerability*

	<i>Sensitive</i>	<i>Insensitive</i>
<i>Vulnerable</i>	Terbuka terhadap perubahan politik dan sosial yang konstan, memungkinkan dipengaruhi pihak luar	Memilih untuk memisahkan diri dari pihak lain, namun terkadang harus bereaksi terhadap proses globalisasi

<i>Invulnerable</i>	Merasa tertekan untuk melakukan perubahan, tetapi tidak membutuhkan perubahan yang segera, memiliki pilihan atau alternatif, memiliki waktu untuk bereaksi	Sangat hegemon atau imperialistik; tidak terpengaruh oleh tindakan yang dipilih oleh pihak lain; memiliki berbagai alternatif yang dapat diaplikasikan dengan cepat
---------------------	--	---

Sumber: Rogerson, 2000:422)

Tabel 1.1 memberikan gambaran *sensitivity* dan *vulnerability* berdasarkan asumsi interdependensi kompleks. Posisi aktor dapat berubah tergantung pada isu dan kondisi yang dihadapi. Sebuah entitas harus dapat benar-benar tidak sensitif dan rentan untuk menjadi tidak interdependen sama sekali. Namun untuk mempertahankan suatu dominasi ataupun kepemimpinan dalam suatu isu atau area permasalahan seperti hubungan ekonomi, militer, atau pertukaran arus informasi, entitas diharuskan untuk sedikit sensitif dan dapat juga sedikit *vulnerable* meskipun hanya sementara (Rogerson, 2000). Tetapi perlu diingat bahwa interdependensi bukan berarti terdapat persamaan (*equality*). Menurut Comor (seperti dikutip Rogerson, 2000:422) kemampuan

individu ataupun kelompok dalam membentuk sistem konseptual secara langsung agar dapat digunakan bagi aktor lain merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu diperlukan adanya aktor yang mengontrol agar hubungan interdependen dapat terjadi. Keohane dan Nye juga memberi catatan mengenai hal ini. Dikatakan bahwa aturan membutuhkan sebuah otoritas, baik dalam bentuk pemerintah, privat, ataupun suatu komunitas (Rogerson, 2000).

Terkadang, hubungan interdependen diasumsikan menguntungkan bagi setiap pihak. Hal ini disebut sebagai interdependensi positif atau *symmetrical interdependence*. Akan tetapi hubungan yang positif ini tidak menggambarkan realita. Jones dan Willets (seperti dikutip Rogerson, 2000:423) mengatakan bahwa cara tercepat dan paling signifikan untuk melihat interdependensi adalah dengan pola yang asimetris dan tidak berimbang. Menurut Keohane dan Nye (seperti dikutip Rana, 2015: 291) Sistem internasional tidak dapat berfungsi dalam sistem interdependensi yang simetris atau positif dimana setiap aktor memberi dan mendapatkan hal yang sepadan. Interdependensi bukanlah sebuah situasi dimana segala hubungan mutual yang sepadan. Keohane dan Nye menyebutnya sebagai *asymmetrical interdependence* atau interdependensi asimetris. Kondisi ini

dapat terjadi karena dalam setiap interdependensi, akan ada aktor yang kondisinya tidak memerlukan ketergantungan yang berlebihan, aktor tersebut kemudian akan mendapat power yang lebih dan kedudukan serta keuntungan yang lebih tinggi dalam hubungan ketergantungan mutual tersebut. Aktor tersebut kemudian akan bertindak sebagai aktor yang kurang bergantung (*less interdependent*) dalam dunia interdependensi. Aktor tersebut tidak terlalu terikat, terkadang bahkan menunjukkan tanda-tanda dari imperialisme. Dengan kata lain, aktor yang *less interdependent* dapat memiliki pengaruh yang lebih besar pada kebijakan internasional dan bukan sekedar meresponnya saja (Rogerson, 2000). Dalam penelitian ini, penulis berhipotesis bahwa adanya perbedaan keuntungan yang didapat dari interdependensi di dalam C-TPAT akan mempengaruhi aktor-aktor yang terlibat didalamnya untuk kemudian berperan pada peningkatan *global supply chain security*.

B. Hasil dan Pembahasan

Peristiwa 11 September 2001 ini meningkatkan kesadaran terhadap risiko yang dapat terjadi, dikarenakan munculnya ketakutan diantara badan pabean dan para pelaku ekonomi utamanya pihak-pihak yang terlibat dalam proses manajemen *supply chain* terhadap ancaman teroris yang sewaktu-waktu dapat menyerang pelabuhan dan kargo internasional.

CTPAT kemudian hadir sebagai program untuk melindungi *supply chain* (rantai pasok), mengidentifikasi segala celah keamanan, dan mengimplementasikan indikator atau ukuran yang spesifik untuk memperkuat keamanan perbatasan dan untuk menjamin Amerika Serikat tetap aman. CTPAT juga didesain untuk melindungi industri perdagangan dunia dari terorisme, menjaga kestabilan ekonomi bagi Amerika Serikat dan negara-negara sekitarnya, adanya CTPAT juga diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan ekonomi yang kondusif (CTPAT, 2015). Dengan kata lain, program CTPAT ini merupakan program dimana CBP (Custom and Border Protection) bekerjasama dengan komunitas perdagangan untuk memperkuat rantai pasok internasional dan juga meningkatkan keamanan perbatasan Amerika Serikat. CTPAT ini dibuat sebagai strategi *multi-layer* pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman keamanan logistik (Altemoller, 2011).

Dengan menggunakan teori interdependensi kompleks oleh Keohane dan Nye, dapat diteliti bahwa CTPAT merupakan gabungan dari *multiple channels* atau banyak aktor. Aktor yang dimaksud bukanlah sebatas pada negara saja namun juga terdapat entitas-entitas atau perusahaan yang memiliki peranan dan kepentingan dalam *supply chain*

global. Hal ini semakin diperkuat dengan bentuk kerjasama yang diusung oleh CTPAT yaitu *public private partnership*. Terdapat *multiple issues* atau isu yang saling tumpang tindih di dalam usaha untuk meningkatkan keamanan *supply chain* global dari mulai keamanan perbatasan, isu terorisme dan kejahatan lain, keuntungan atau profit perusahaan dan yang saling overlap dalam CTPAT sehingga program ini dapat menjadi wadah bagi *multiple channels* atau aktor-aktor dalam *supply chain* untuk berinteraksi dan menghasilkan sebuah pola interdependensi kompleks dalam mengatasi isu-isu yang sering muncul dalam upaya meningkatkan *global supply chain security* (Rogerson, 2000).

Namun, Interdependensi kompleks yang terdapat dalam CTPAT ini ternyata menghasilkan suatu pola interdependensi yang asimetris atau tidak sejajar (*Assymetrcal Interdependence*). Artinya ada pihak yang paling banyak diuntungkan (*most benefited*) dan paling sedikit diuntungkan (*less benefited*) dari interdependensi yang ada dalam CTPAT. Untuk mengetahui hal tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemetaan terhadap kepentingan aktor-aktor yang terlibat di dalam program CTPAT. Dikarenakan program ini adalah *public private partnership*, jadi dapat dipastikan bahwa partner Amerika Serikat dalam meningkatkan keamanan *supply chain*

adalah entitas-entitas yang memiliki hubungan atau berperan di dalam proses aktivitas *supply chain*. CBP telah menentukan hingga 12 jenis perusahaan yang dapat bergabung dengan CTPAT. 12 jenis perusahaan ini ditentukan dengan dasar keterlibatannya di dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang berjalannya aktivitas *supply chain*. Tujuan dari entitas-entitas untuk bergabung dengan CTPAT adalah karena entitas atau perusahaan masih berorientasi pada keuntungan. CTPAT menawarkan beragam keuntungan bagi para partnernya dimana keuntungan tersebut akan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman barang sehingga waktu yang digunakan untuk memproduksi barang juga dapat dipersingkat dan akan berdampak pada meningkatnya keuntungan perusahaan. Namun sebelum entitas dapat tersertifikasi dan menikmati berbagai keuntungan yang ditawarkan CTPAT, entitas harus terlebih dahulu melewati serangkaian proses pendaftaran serta menginvestasikan modalnya untuk mengimplementasikan kriteria minimum CTPAT. Namun bukan berarti ketika entitas sudah tersertifikasi lalu kemudian dapat menikmati keuntungan yang ditawarkan CTPAT. Setiap empat tahun sekali, akan dilakukan revalidasi terhadap entitas yang sudah tersertifikasi CTPAT. Permasalahan seperti lemahnya kinerja Web Portal CTPAT juga dapat

mengancam kelancaran aktivitas entitas dikarenakan pengolahan dan penggunaan data hampir seluruhnya berbasis online (GAO, 2017).

Berdasarkan *Cost/Benefit 2007 Survey* yang dilakukan oleh CBP bekerjasama dengan *University of Virginia*, dapat diketahui besaran biaya untuk mengimplementasikan biaya peningkatan keamanan sesuai dengan standar CTPAT serta biaya untuk pemeliharaan keamanan bagi segala jenis perusahaan. Berikut ini adalah korelasi antara keamanan dan kebutuhan manusia, yaitu:

Tabel 1.2 Perbandingan Keamanan dan Kebutuhan

Potential Implementation Costs	n	Increasing Costs	Average Cost (n) atau program CTPAT
Improving Physical Security	1,287	57.2	\$38,741
Improving in-house awareness	1,213	52.3	\$30,506
Salaries and expenses of personnel	1,349	45.2	\$32,986 (463)
Improving cargo security	1,236	43.7	\$18,443 (379)
Improving personnel security procedures	1,250	43.2	\$14,148 (292)
Improving indentification system	1,246	41.7	\$9,681 (331)
Improving personnel screening procedures	1,233	35.8	\$7,079 (249)
Improving IT systems an databases	1,221	33.7	\$24,303 (256)
Improving use of security for personnel	1,248	19.7	\$35,682 (148)

Dengan melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa penigkatan keamanan fisik (pintu, jendela, akses elektronik, pagar, kamera, gerbang, pencahayaan, dsb.) merupakan yang

tertinggi dengan biaya rata-rata sebesar \$38,741. Berbeda dari implementasi berdasarkan jenis bisnis yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada potensi implementasi, lamanya waktu perusahaan yang sudah tersertifikasi CTPAT justru berpengaruh signifikan pada jumlah yang dikeluarkan untuk meningkatkan keamanan. Perusahaan yang lebih dari 3 tahun tersertifikasi oleh CTPAT disebutkan lebih banyak mengeluarkan biaya dengan rata-rata \$52,824 yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi tenaga ahli yang dikontrak atau dipekerjakan untuk membantu

mengimplementasikan program CTPAT dibandingkan dengan Perusahaan yang baru tersertifikasi selama 2 sampai 3 tahun (\$30,506) dan kurang sari 2 tahun (\$17,778) (Abdoulaye Diop, 2007). Perusahaan yang sudah tersertifikasi selama lebih dari 3 tahun juga mengeluarkan biaya lebih banyak dalam meningkatkan atau mengimplementasikan prosedur pengecekan personel (\$10,999) dibandingkan dengan perusahaan yang tersertifikasi kurang dari 2 tahun (\$7,123) dan 2 (sampai 3 tahun) (\$3,163). Biaya rata-rata untuk meningkatkan atau

mengimplementasikan *in-house education, training, dan awereness* bagi perusahaan yang tersertifikasi lebih dari 3 tahun menyentuh angka \$14,148. Sedangkan Perusahaan yang

telah tersertifikasi 2-3 tahun biaya perawatan lebih banyak

Potential Factors for All Business Types	Increased	Stayed the Same	Decreased	Unknown	Does not apply	Number Respondi
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	#
Time to release cargo by CBP	11.6	50.4	26.4	8.9	2.7	1,487
Time in CBP inspection lines	7.8	43.7	24.8	16.1	7.6	1,481
Predictabilty of moving goods	24.4	51.2	6.8	10.5	7.1	1,482
Opportunities for cost avoidance	16.8	49.7	6.2	19.7	7.6	1,473
Cargo theft and pilferage	4.7	49.5	15.6	14.8	15.4	1,477
Asset utilization	10.7	53.0	3.0	17.8	15.5	1,476
Security for workforce	34.8	43.6	1.4	11.2	9.0	1,478
Penalties	3.0	47.8	13.8	16.4	19.0	1,481
Insurance rates	2.8	61.2	5.4	17.9	12,7	1,476

menghabiskan biaya rata-rata sebesar \$9,188 dan Perusahaan yang tersertifikasi kurang dari 2 tahun sebesar \$4,315. Selain harus mengeluarkan biaya untuk implementasi standar, Perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan keamanan.

Keamanan fisik menjadi biaya dengan tingkatan tertinggi dalam pengeluaran biaya perawatan disusul dengan biaya perawatan *in house education, training awareness* dengan persentase 47.5 persen dan 45 persen. Sedangkan biaya tertinggi yang harus dikeluarkan perusahaan adalah perawatan keamanan bagi personil yang mencapai \$40,441. Ukuran dari Perusahaan juga menentukan besaran biaya perawatan dalam program CTPAT. Secara umum, Perusahaan dengan pendapatan tahunan \$10 milyar atau lebih akan mengeluarka

dibandingkan Perusahaan dengan pemasukan kurang dari \$10 juta. Kedua jenis pengeluaran tersebut kemudian mempengaruhi pengeluaran tahunan dari Perusahaan yang tersertifikasi dalam CTPAT. Perusahaan yang tersertifikasi lebih dari 3 tahun mencatatkan rata-rata pengeluaran tahunan sebesar \$106,337, jauh lebih besar dibandingkan dengan Perusahaan yang tersertifikasi kurang dari 2 tahun (\$31,031) dan Perusahaan yang tersertifikasi 2-3 tahun (\$28,351) (Abdoulaye Diop, 2007).

Dari tabel diatas, perubahan yang paling terasa bagi Perusahaan tersertifikasi CTPAT adalah meningkatnya keamanan dalam lingkungan kerja yaitu sebesar 34.8%, semenjak Perusahaan tersebut mengikuti CTPAT. Namun jika diamati, mayoritas dari Perusahaan belum merasakan perubahan ke arah yang positif atau yang berkenaan dengan faktor-faktor potensial yang dapat menjadi keuntungan bagi Perusahaan yang mengikuti CTPAT. Pada tahun 2017 atau 10 tahun setelah *cost/benefit survey* dilakukan US Government Accountability Office (GAO) mengeluarkan reportase yang berisikan mengenai permasalahan yang ada pada CTPAT terkait dengan pengolahan data. Terjadi permasalahan sistem data yang mempengaruhi CTPAT dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan validasi keamanan anggota. Hal ini disebabkan karena adanya pemindahan data dari Web Portal 1.0 ke Web Portal 2.0 sejak 2015. Tujuan awal dari pemindahan data ini sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan fungsi dan komunikasi antara ahli-ahli keamanan dengan member CTPAT. US GAO juga menemukan bahwa sejak 2012, CBP telah menggabungkan data terkait beberapa kejadian atau tindakan yang diambil ketika ada kargo masuk seperti pengecekan, penahanan, dan waktu pemrosesan baik bagi anggota

CTPAT maupun yang non anggota melalui CTPAT Dashboard. Namun berdasarkan analisis data dari US GAO, diketahui bahwa staf-staf CBP tidak mampu untuk menentukan dan mengukur anggota CTPAT mana saja yang menerima keuntungan dibandingkan dengan non anggota (GAO, 2017).

Menanggapi reportase yang dikeluarkan oleh US GAO, Reynlod Hutchins dari JOC.com mengatakan bahwa sebagian Perusahaan kargo mengeluh mengenai persyaratan dan biaya potensial yang dikeluarkan lebih besar ketimbang keuntungan yang diberikan CBP. Hal ini diperkuat dengan reportase yang dikeluarkan GAO. CBP tidak mampu menentukan tingkatan anggota CTPAT yang menerima keuntungan dikarenakan terdapat masalah data. Survey dari CBP menunjukkan bahwa terdapat tiga biaya implementasi CTPAT terbesar, yaitu mengimplementasi dan meningkatkan keamanan fisik yang mencapai \$15,000. Kemudian untuk biaya untuk mengimplementasikan dan meningkatkan pengembangan database, rata-rata mengeluarkan biaya sebesar \$12,500. Untuke pembayaran gaji dan tunjangan tenaga ahli atau kontrak yang dipanggil untuk membantu mengimplementasikan dan manajemen standar CTPAT memakan biaya rata-rata \$12,000. Biaya perawatan bahkan makin membebani Perusahaan anggota CTPAT. Perusahaan harus

mengeluarkan biaya sebesar \$7,500 untuk penggajian personil, \$5,100 untuk mengimplementasikan penggunaan petugas keamanan, dan \$3000 untuk keamanan fisik (Reynold Hutchins, 2017).

Selain bekerjasama dengan entitas atau sektor swasta, CTPAT juga membuka opsi kerjasama dengan Agensi Pabean atau rezim *supply chain* lainnya di seluruh dunia melalui Mutual Recognition Agreement (MRA). MRA merupakan cara CTPAT untuk menerapkan strategi internasionalnya. Terjalinya suatu MRA menunjukkan bahwa persyaratan dan standar keamanan termasuk prosedur verifikasi dalam program AEO atau sejenisnya, sudah sesuai dengan standar milik CTPAT (Orosz, 2018). Dan dikarenakan MRA merupakan strategi jangka panjang, maka diperlukan adanya kesadaran dari badan pabean, Program AEO dan komunitas perdagangan mengenai waktu, usaha, dan sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan MRA (Orosz, 2018). CTPAT melakukan kerjasama dengan komunitas perdagangan internasional dan otoritas AEO untuk menguatkan peran CTPAT sebagai bagian penting dari *global supply chain security*. Komitmen yang terjalin dalam MRA dapat menghubungkan beragam progra, serupa sehingga dapat menciptakan *supply chain security* dari awal hingga akhir yang terpadu dan terjamin untuk memfasilitasi perdagangan global yang efisien dan

aman. MRA juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi seperti WCO dan APEC sehingga mendorong usaha untuk meningkatkan keamanan dan integritas yang dibutuhkan dalam keanggotaan (Orosz, 2018). Di dalam MRA, usaha yang dilakukan oleh AEO lain dengan CTPAT cenderung seimbang karena kedua belah pihak saling berusaha untuk menyamakan standar sehingga dapat tercapai MRA. Namun lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan standar masing-masing ini menyebabkan hanya segelintir AEO saja yang dapat menjalin MRA dengan CTPAT.

Sedangkan aktor utama dalam CTPAT adalah Amerika Serikat sendiri. CBP dalam berbagai kesempatan telah menyebutkan bahwa CBP melakukan kerjasama melalui CTPAT dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan *supply chain* global sekaligus menjaga dan meningkatkan keamanan perbatasan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari program CTPAT itu sendiri yang mana berisikan tentang standar keamanan yang diperuntukkan bagi para pemain kunci *supply chain* yang berkeinginan atau memiliki aktivitas di dalam Amerika Serikat. Jika perusahaan atau entitas ingin mendapat kemudahan dalam beraktivitas ekspor-impor dengan Amerika Serikat, maka menjadi partisipan CTPAT merupakan suatu pilihan utama atau prioritas untuk mendapatkan kemudahan tersebut.

Efisiensi waktu dalam pengiriman kargo akan didapat ketika perusahaan mengikuti CTPAT, sehingga profit perusahaan yang didapat akan semakin banyak. Namun jika ingin menjadi perusahaan yang tersertifikasi, perusahaan harus mengeluarkan modal untuk meningkatkan prosedur-prosedur keamanannya sesuai dengan *minimum security criteria* milik CTPAT. Dikarenakan adanya kebutuhan untuk investasi di bidang keamanan yang tidak sedikit, maka perusahaan-perusahaan kecil sangat terbebani jika harus mengikuti CTPAT, namun jika perusahaan atau entitas sering melakukan aktivitas perdagangan dengan atau di Amerika Serikat, maka investasi dalam bidang keamanan untuk masuk kriteria CTPAT merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan.

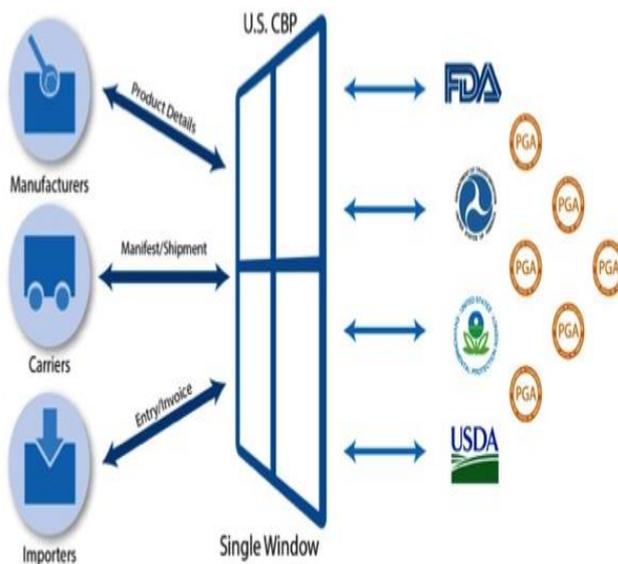
Dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh partisipan CTPAT, menyebabkan pesatnya pertumbuhan partisipan CTPAT, yang awal berdirinya hanya tujuh perusahaan, hingga 2018 sudah terdapat lebih dari 11,400 entitas dari berbagai jenis perusahaan yang berperan aktif dalam aktivitas *supply chain*. Hal ini tentu saja dikarenakan jenis kerjasama *public-private partnership* yang diusung oleh CTPAT. CBP memfokuskan kerjasama CTPAT dengan sektor swasta karena sektor swasta berorientasi pada keuntungan. Sehingga ketika ada program yang dapat meningkatkan keamanan serta

memberi keuntungan, maka hal ini akan menarik sektor swasta untuk bergabung. Disisi lain, adanya alasan untuk melindungi *supply chain* global membuat perusahaan-perusahaan yang bergabung dengan CTPAT dikategorikan sebagai perusahaan yang aman dan minim resiko sehingga akan berdampak pada reputasi perusahaan yang meningkat. Namun bukan hanya keamanan *supply chain* global saja yang terpengaruh dengan adanya CTPAT. Keamanan dalam negeri Amerika Serikat pun juga bergantung terhadap entitas-entitas yang tergabung dalam program ini. Jadi ketika entitas setuju untuk menandatangani perjanjian CTPAT secara tidak langsung entitas tersebut setuju untuk membantu menjaga keamanan Amerika Serikat.

Amerika Serikat melalui CBP sebagai penyelenggara CTPAT membuat program ini sebagai program yang keanggotaannya *voluntary*. Sehingga semua entitas *supply chain* dapat bergabung dengan CTPAT selama entitas tersebut dapat memenuhi syarat minimum. Ini berarti bahwa Amerika Serikat tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk membuka kerjasama dengan entitas manapun dikarenakan entitas akan menggunakan modalnya sendiri untuk berinvestasi meningkatkan keamanan *supply chain* miliknya. Entitas membutuhkan keuntungan yang diberikan Amerika Serikat dari CTPAT dan Amerika Serikat butuh entitas-entitas untuk bergabung ke

dalam CTPAT untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan *global supply chain security* dengan tetap mengutamakan keamanan Amerika Serikat. Adanya saling ketergantungan ini menunjukkan pola interdependensi yang kompleks namun asimetris dikarenakan ada salah satu pihak yang secara kasat mata lebih diuntungkan dari adanya *public-private partneship*. Namun tetapi, Amerika Serikat tetap berusaha memastikan para partisipan CTPAT untuk mendapatkan keuntungan, hal ini dilakukan agar tujuan Amerika untuk melakukan kerjasama tetap tercapai.

Dengan tetap menjaga CTPAT selalu menjanjikan dan terbuka bagi entitas yang berkeinginan untuk bergabung, menunjukkan adanya interdependensi antara Amerika Serikat dan partisipan CTPAT yang menguntungkan. Dan Amerika Serikat semakin diuntungkan dengan adanya sistem *single window* antara CBP dengan agensi lain



Partnering Government Agency lainnya. Memang sistem ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas di dalam *supply chain*, serta dapat meningkatkan arus informasi yang dapat digunakan untuk mitigasi yang lebih awal terhadap kargo berkategori *high risk*. Dengan adanya sistem ini juga dapat meningkatkan interoperabilitas (kesinambungan) antar agensi. Sehingga jika suatu entitas setuju untuk berpartisipasi dengan CTPAT, maka nantinya entitas tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang berasal dari agensi lain. Seperti misalkan sebuah kargo bermuatan bahan pangan atau hasil agrikultur, maka selain harus mengikuti CTPAT karena dapat mempercepat pengiriman, kargo tersebut juga harus sesuai dengan standar FDA, seperti harus dilakukannya fumigasi dan sebagainya. Sistem seperti ini memang akan sedikit mempersulit entitas, namun jika dilakukan, keuntungan dan keamanan *supply chain* entitas akan semakin terjamin (WCO Conference, 2015).

Dari penjabaran diatas, untuk mempermudah melihat aktor mana yang lebih diuntungkan dalam CTPAT maka dibuatlah tabel pemetaan serta peletakan posisi aktor dalam kerjasama sebagai berikut,

Aktor	Keuntungan	Kerugian	Hasil
Entitas yang termasuk dalam 12 jenis perusahaan yang ditentukan dapat mendaftar CTPAT	(1)Peningkatan keamanan di lingkungan kerja (2)Dapat memprediksi perjalanan kargo (<i>visibilitas</i>) (3)Menjalin relasi dengan CBP (4) <i>Good Corporate Citizenship</i>	(1)Biaya implementasi tinggi (2)Biaya <i>maintenance</i> tinggi (3)Biaya yang dikeluarkan lebih banyak dari keuntungan yang didapat (4)Kesalahan pengolahan data oleh CBP (5)Keuntungan tidak segera dirasakan perusahaan (6)Terdapat pembagian tingkatan	Lebih banyak Kerugian. Perusahaan kurang diuntungkan (<i>Less Benefited</i>)
Amerika Serikat / CBP/ CTPAT	(1)Meningkatkan keamanan nasional (2)Dapat meningkatkan <i>public safety</i> (3)Dapat memberlakukan berbagai regulasi sekaligus (4)Menjaring perusahaan yang berminat untuk meningkatkan keamanan <i>supply chain</i> (5)Melindungi fasilitas dan stabilitas perdagangan Amerika Serikat (6)Membuka kesempatan untuk ikut andil dalam peningkatan <i>global supply chain security</i> (7) Semakin banyak partisipan maka peran CTPAT akan semakin penting dalam peningkatan <i>global supply chain security</i>	(1)Tidak dapat menjamin keuntungan bagi Perusahaan (2)Keluarnya Perusahaan dari keanggotaan CTPAT akan menyebabkan berkurangnya keuntungan yang didapat Amerika Serikat	Lebih banyak mendapat keuntungan. Amerika lebih diuntungkan (<i>More Benefited</i>)

Dengan memetakan kepentingan dari aktor-aktor atau entitas yang terlibat dalam CTPAT, dapat diketahui bahwa Amerika Serikat, negara asal CTPAT merupakan pihak yang paling

diuntungkan dari interdependensi kompleks yang ada pada CTPAT. Interdependensi kompleks yang dihasilkan dari *public private partneship* di CTPAT membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk menjadi aktor yang *sensitive* namun

less vulnerable sehingga memunculkan pola interdependensi asimetris yang menghasilkan dominasi Amerika Serikat dalam program CTPAT.

C. Penutup

Peristiwa 11 September 2001 ini meningkatkan kesadaran terhadap risiko yang dapat terjadi, dikarenakan munculnya ketakutan diantara badan pabean dan para pelaku ekonomi utamanya pihak-pihak yang terlibat dalam proses manajemen *supply chain* terhadap ancaman teroris yang sewaktu-waktu dapat menyerang pelabuhan dan kargo internasional. CTPAT kemudian hadir sebagai program untuk melindungi *supply chain* (rantai pasok), mengidentifikasi segala celah keamanan, dan juga mengimplementasikan indikator atau ukuran yang spesifik untuk memperkuat keamanan perbatasan dan untuk menjamin Amerika Serikat tetap aman. CTPAT juga didesain untuk melindungi industri perdagangan dunia dari terorisme, menjaga kestabilan ekonomi bagi Amerika Serikat dan negara-negara sekitarnya, adanya CTPAT juga diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan ekonomi yang kondusif (CTPAT, 2015). Dengan kata lain, program CTPAT ini merupakan program dimana CBP (Custom and Border Protection) bekerjasama dengan komunitas perdagangan untuk memperkuat rantai pasok internasional dan juga meningkatkan

keamanan perbatasan Amerika Serikat.

Dengan menggunakan teori interdependensi kompleks oleh Keohane dan Nye, dapat diteliti bahwa CTPAT merupakan gabungan dari *multiple channels* atau banyak aktor. Aktor yang dimaksud bukanlah sebatas pada negara saja namun juga terdapat entitas-entitas atau perusahaan yang memiliki peranan dan kepentingan dalam *supply chain* global. Hal ini semakin diperkuat dengan bentuk kerjasama yang diusung oleh CTPAT yaitu *public private partnership*. Terdapat *multiple issues* atau isu yang saling tumpang tindih di dalam usaha untuk meningkatkan keamanan *supply chain* global dari mulai keamanan perbatasan, isu terorisme dan kejahatan lain, keuntungan atau profit perusahaan dan yang saling overlap dalam CTPAT sehingga program ini dapat menjadi wadah bagi *multiple channels* atau aktor-aktor dalam *supply chain* untuk berinteraksi dan menghasilkan sebuah pola interdependensi kompleks dalam mengatasi isu-isu yang sering muncul dalam upaya meningkatkan *global supply chain security*. Interdependensi kompleks yang terdapat dalam CTPAT ini ternyata menghasilkan suatu pola interdependensi yang asimetris atau tidak sejajar. Artinya ada pihak yang paling banyak diuntungkan dan paling sedikit diuntungkan dari pola interdependensi yang ada dalam CTPAT. Dengan memetakan

kepentingan dari aktor-aktor atau entitas yang terlibat dalam CTPAT, dapat diketahui bahwa Amerika Serikat, negara asal CTPAT merupakan pihak yang paling diuntungkan dari interdependensi kompleks yang ada pada CTPAT.

Maka dari itu, Amerika Serikat berusaha untuk terus menjaga CTPAT agar tetap berjalan dengan berbagai cara seperti internasionalisasi CTPAT dan revalidasi anggota agar selalu relevan dengan CTPAT dan kondisi *supply chain* yang terus berkembang. Dengan masih adanya program CTPAT hingga saat ini membuktikan bahwa usaha-usaha yang dilakukan Amerika Serikat berhasil, hal ini juga dapat dilihat dari jumlah partisipan CTPAT yang terus bertambah.

D. Referensi

- Abdoulaye Diop, D. H. (2007). *CTPAT Cost/Benefit Survey*. Virginia: University of Virginia and US CBP.
- Arnaud Costinot, J. V. (2011). *An Elementary Theory of Global Supply Chain*. National Bureau of Economic Research , 1-24.
- CBP. (2018). *C-TPAT: Custom Trade Partnership Against Terrorism*. Dalam: <https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat> (diakses pada 12 April 2018)
- CMCI Presentation on Integrated Custom Solution, (2015)
- CTPAT. (2015). *Introduction*. Dalam: www.c-tpat.com. (diakses pada 22 Februari 2018)
- Dr. Zaroni, C. C. (2016). *Mengelola Ancaman dan Risiko Keamanan dalam Rantai Pasok*. Dalam: <http://supplychainindonesia.com/new/mengelola-ancaman-dan-risiko-keamanan-dalam-rantai-pasok/> (diakses pada 24 April 2018)
- GAO. (2017). *SUPPLY CHAIN SECURITY: Providing Guidance and Resolving Data Problems Could Improve Management of the Customs-Trade Partnership Against Terrorism Program*. United States Government Accountabilty Office Reports , 8.
- Holsti, K. J. (1978). *A New International Politcs? Diplomacy in Complex Interdependence*. International Organization Volume 32 Issue 02 , 517-530.
- Nuraeni Suparman, D. S. (2010). *Regionalisme dalam Hubungan internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Orosz, A. (2018). *CBP's Supply Chain Security Intiative March 2018*. 12th World Cargo Simposium (p. 8). Dallas: IATA.
- Perwita, A. A. (2014). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Renda, K. K. (2011). *Turkeys Neighborhood Policy: An Emerging Complex*

- Interdependence?. Insight Turkey*
Volume 13 No. 01, 89-108.
- Reynold Hutchins. (2017). *US Watchdogs: No way to tell if importers gain from CTPAT*. Dalam: https://www.joc.com/regulation-policy/customs-regulations/us-customs-regulations/us-watchdog-no-way-tell-if-importers-gain-ctpat_20170214.html (diakses pada 28 Maret 2019)
- Rogerson, K. S. (2000). *Information Interdependence: Keohane and Nye's Complex Interdependence in The Information Age*.
- Informatio. Communication and Society*, 415-436.
- Sheffi, Y. (2001). *Supply Chain Management Under The Threat of International Terrorism*. Massachusetts Institute of Technology, 1.
- WCO. (2012). *WCO SAFE Package*. Dalam: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx (diakses pada 12 Februari 2018)